

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

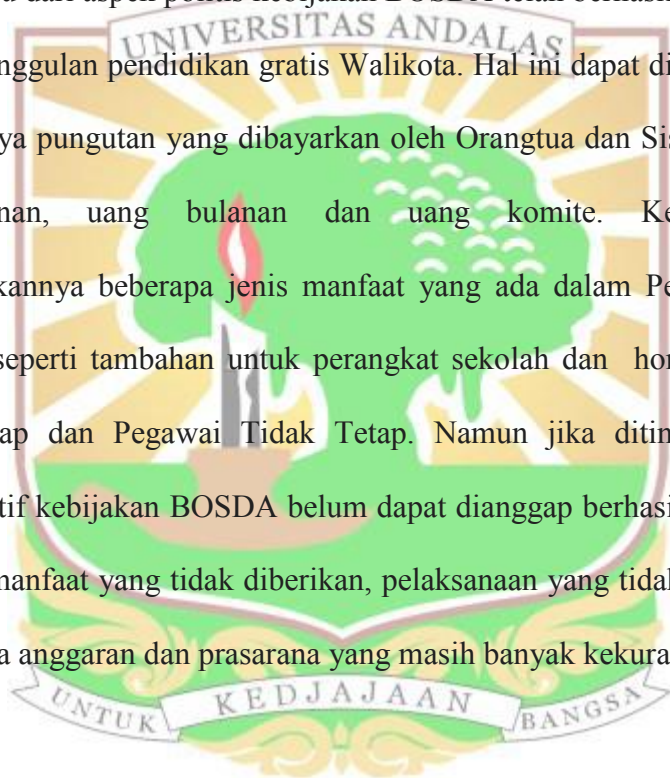
Dari temuan dan analisis yang peneliti paparkan pada pembahasan, untuk variabel isi kebijakan (*content of policy*) dapat disimpulkan bahwa kepentingan kelompok sasaran sudah termuat dalam kebijakan. Selain itu, dari beberapa kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan BOSDA, kepentingan Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap mendominasi kebijakan. Dominasi ini mempengaruhi jenis manfaat yang diberikan dari kebijakan BOSDA. Derjat perubahan yang diinginkan dari kebijakan BOSDA adalah menyelenggarakan wajib belajar 12 tahun tanpa pungutan, derjat perubahan ini adalah derjat perubahan yang skalanya untuk jangka panjang namun tidak membutuhkan adaptasi dan partisipasi yang tinggi dari sasaran.

Pengambil Keputusan kebijakan BOSDA adalah Walikota dan Dinas Pendidikan untuk keputusan-keputusan teknis. Wewenang yang diberikan Walikota untuk Dinas Pendidikan sebagai pengambil keputusan memberikan kebebasan kepada Dinas untuk menentukan apa yang menjadi *input* dan *output* dari setiap revisi dan reformulasi kebijakan. Sementara pelaksana BOSDA adalah Dinas Pendidikan Kota Padang. Terjadi beberapa kali revisi kebijakan, yang disebabkan oleh kenaikan anggaran. Komitmen sumberdaya masih rendah dilihat dari sumberdaya manusia, sumberdaya finansial dan

sumberdaya prasarana pendidikan. Hal ini menjadi penyebab kurang diterimanya kebijakan BOSDA bagi sejumlah kalangan.

Sementara untuk indikator yang ada pada variabel lingkungan implementasi (*context of policy*) dapat disimpulkan bahwa Kebijakan BOSDA sangat dipengaruhi oleh lingkungan implementasi terutama lingkungan politik. Kebijakan BOSDA muncul sebagai *Output* dari tuntutan dan dorongan untuk merealisasikan program unggulan Walikota. Program unggulan Walikota menjadi tuntutan dalam sistem *input* yang harus direalisasikan oleh Walikota. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat dapat dilihat dari kekuasaan dan kepentingan Walikota sebagai Kepala Daerah yang harus melaksanakan janji kampanyenya. Bahwa semenjak dilantik sebagai Walikota maka mau tidak mau janji kampanye akan ditagih oleh masyarakat. Sementara untuk strategi dapat dilihat dari bagaimana strategi Dinas Pendidikan melaksanakan Program Walikota dengan keterbatasan dana. Karakteristik rezim pemerintahan Mahyeldi-Emzalmi dan karakteristik Dinas Pendidikan sebagai lembaga sangat mempengaruhi proses implementasi. Kepatuhan dan daya tanggap dari Dinas Pendidikan masih sangat rendah, dilihat dari masih adanya beberapa jenis manfaat yang tidak diberikan oleh Dinas sesuai dengan yang diatur di dalam Perwako dan SK Walikota. Daya tanggap dari Dinas juga masih lemah, belum terakomodirnya kebutuhan dan keluhan-keluhan dari siswa melalui Sekolah. Kepatuhan Sekolah untuk melaksanakan pendidikan tanpa pungutan sudah cukup baik, dilihat dari menurunnya laporan dan pengaduan tentang pungutan di Sekolah.

Untuk evaluasi kebijakan, tujuan dari kebijakan BOSDA sudah dapat dikatakan tercapai meski belum maksimal. BOSDA diterima baik oleh masyarakat dan memberi pengaruh yang positif terhadap penyelenggaraan pendidikan di Kota Padang. Meski jika ditinjau dari aspek proses, pelaksanaan BOSDA masih belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan Perwako dan SK Walikota. Dari hasil dan temuan peneliti di lapangan dapat disimpulkan jika ditinjau dari aspek politis kebijakan BOSDA telah berhasil merealisasikan program unggulan pendidikan gratis Walikota. Hal ini dapat dilihat dari sudah tidak adanya pungutan yang dibayarkan oleh Orangtua dan Siswa untuk uang pembangunan, uang bulanan dan uang komite. Kemudian telah direalisasikannya beberapa jenis manfaat yang ada dalam Perwako dan SK Walikota seperti tambahan untuk perangkat sekolah dan honor untuk Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap. Namun jika ditinjau dari aspek administratif kebijakan BOSDA belum dapat dianggap berhasil, karena masih ada jenis manfaat yang tidak diberikan, pelaksanaan yang tidak sesuai dengan aturan serta anggaran dan prasarana yang masih banyak kekurangan.



6.2 Saran

Dari hasil penelitian mengenai Analisis Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Daerah di Kota Padang, ada beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan untuk perbaikan penyelenggaraan pendidikan gratis melalui dana BOSDA di Kota Padang.

1. Dari aspek *content* kebijakan, perlu mengkaji ulang Perwako dan SK Walikota yang mengatur tentang BOSDA. Disintegrasi antara Perwako dan SK Walikota menjadi penyebab kerancuan dalam memahami kebijakan dan berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Hal-hal yang di atur di dalam Perwako harus diturunkan dalam SK Walikota.
2. Dinas Pendidikan perlu melibatkan Sekolah dalam kajian-kajian BOSDA agar apa yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Sekolah.
3. Dinas Pendidikan seharusnya mampu melaksanakan BOSDA sesuai dengan yang di atur di dalam Perwako dan SK Walikota. Seperti menyalurkan dana kegiatan ekstrakurikuler akademik dan non akademik yang berbentuk belanja barang dan jasa ke Sekolah bukan membayarkan untuk keperluan listrik, telepon dan air.
4. Perlu menejelaskan kembali defenisi dari pendidikan “gratis” serta pungutan yang dilarang agar stakeholders memiliki kesamaan pemahaman.
5. Perlu dilakukan upaya perbaikan sarana dan prasarana serta mobiler Sekolah yang masih banyak kekurangan.
6. Dinas Pendidikan juga perlu merespon saran-saran, pandangan-pandangan dari eksternal Dinas Pendidikan. Seperti pandangan anggota legislatif mengenai larangan pungutan. Dinas perlu mengkaji kembali pasal 17 tentang larangan pungutan dengan mengukur sumberdaya finansial dan anggaran. Apakah larangan pungutan di tingkat pendidikan menengah benar-benar akan membantu mewujudkan pendidikan yang berkualitas.

